**Perberdayaan Masyarakat di Sektor Kesehatan**

Ade Heryana, SSt, MKM

**Email: heryana@esaunggul.ac.id**

Dosen Prodi Kesmas, FIKES Universitas Esa Unggul

**KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Permenkes No.65 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan menyatakan:

Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non instruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat, agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan:

1. Upaya fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat tidak bersifat perintah, sehingga penyelenggaraannya tidak wajib dan bersifat sukarela; dan
2. Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk: 1) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan; 2) Mengidentifikasi masalah yang dihadapinya sendiri; dan 3) Melakukan perencanaan dan pemecahan masalah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat setempat.

Pemberdayaan masyarakat mencakup tiga tahapan yang harus dilalui yaitu 1) pembangunan masyarakat *(community development)*; 2) pembangunan yang bertumpu pada masyarakat *(community-based development)*; dan 3) pembangunan yang diarahkan masyarakat *(community driven development)*.

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKTOR KESEHATAN**

Kenapa pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan sangat penting? Ada beberapa alasan dan latar belakang yang menyebabkan kenapa pemberdayaan masyarakat dalam sektor kesehatan begitu penting, antara lain:

1. Amanat Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan “pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan”. UU tersebut mengamanatkan agar dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tertinggi, perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat.
2. Sebagian besar sumberdaya yang dibutuhkan untuk pembangunan merupakan kontribusi atau partisipasi dari masyarakat.
3. Terdapat asas gotong royong yang merupakan budaya masyarakat yang perlu dilestarikan
4. Masalah utama kesehatan adalah perilaku masyarakat. Untuk mengubah perilaku masyarakat agar sehat dibutuhkan kesadaran masyarakat secara mandiri dan dengan bimbingan pemerintah
5. Terdapat potensi besar pada masyarakat yang dapat dimobilisasi untuk melakukan pencegahan penyakit, sementara di lain pihak sumberdaya pemerintah terbatas. Potensi tersebut di antaranya kepemimpinan, organisasi, pendanaan, sarana prasarana, pengetahuan, teknologi, dan proses pengambilan keputusan
6. Masyarakat memiliki kemampuan menjalankan pencegahan yang lebih efektif dan efisien dibanding pengobatan.

Dalam sejarahnya, pemerintah RI pada era tahun 70-80 an pernah berhasil mengembangakan program Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD), dan mengalami pasang surut pada era reformasi. PKMD menjadi motivasi tim Penggerak PKK untuk tetap menyelenggarakan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Sebagian besar desa dan kelurahan di Indonesia telah memiliki Posyandu.

Menurut Permenkes No. 65 tahun 2013 terdapat dua proses dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, yaitu:

1. Pemberian informasi secara terus menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan kelompok, baik kepada individu, keluarga, atau kelompok; dan
2. Proses membantu kelompok agar berubah:
3. Dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (aspek pengetahuan/*knowledge*);
4. Dari tahu menjadi mau (aspek sikap/*attitude*)
5. Dari mau menjadi mampu melaksanakan tindakan yang diperkenalkan (aspek tindakan/*practice*).

Tujuan pemberdayaan kesehatan di bidang kesehatan difokuskan pada upaya meningkatkan:

1. Perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
2. Kemandirian masyarakat dalam sistem peringatan dini, penanggulangan dampak kesehatan akibat bencana, serta terjadinya wabah/KLB
3. Keterpaduan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan kegiatan lain yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan *(income generating)*.

Untuk mencapai tujuan di atas, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan menggunakan alat/wahana yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakatnya sendiri. Wahana ini dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat dengan bimbingan petugas Puskesmas, lintas sektor, atau lembaga terkait lainnya. Wahana ini disebut dengan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). Disamping UKBM, berbagai faktor baik internal maupun eksternal ikut berpengaruh terhadap keberhasilan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Salah satu faktor eksternal adalah pendampingan oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat.

Permberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang efektif dan efisien dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keterlibatan dalam pemberdayaan masyarakat tidak mengalami pemaksaan, dan dilandasi kesadaran sendiri, dengan motivasi memperbaiki dan memecahkan masalah yang dihadapi, disebut prinsip Sukarela;
2. Mampu mandiri atau lepas dari ketergantungan terhadap individu, kelompok, atau lembaga tertentu, disebut prinsip Otonom;
3. Mampu merumuskan pelaksanaan kegiatan tanpa menunggu atau mengharapkan dukungan dari pihak luar, disebut prinsip Mandiri;
4. Semua pemangkukepentingan ikut serta sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pemanfaatan hasil-hasil kegiatan, disebut dengan prinsip Partisipatif;
5. Menempatkan semua pemangku kepentingan dalam kedudukan yang setara dan sejajar, disebut dengan prinsip Egaliter;
6. Memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapat, dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan sesama pemangku kepentingan, disebut dengan prinsip Demokrasi;
7. Kejujuran, saling saling percaya dan saling memperdulikan, disebut dengan prinsip Kejujuran;
8. Saling berbagi rasa, saling membantu dan mengembangkan sinergisme, disebut dengan prinsip Kebersamaan;
9. Dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh siapapun, disebut dengan prinsip Akuntabilitas
10. Memberi kewenangan kepada setiap daerah otonom (kabupaten dan kota) untuk mengoptimalkan sumberdaya kesehatan bagi kemakmuran masyarakat dan kesinambungan pembangunan, disebut dengan prinsip Desentralisasi ;
11. Menghargai pengetahuan, keterampilan, budaya, proses, dan sumberdaya lokal, disebut prinsip Kearifan lokal;
12. Terdapat keterkaitanm, keberagaman, keseimbangan, dan keberlanjutan yang disebut dengan prinsip Ekologis; dan
13. Tidak merugikan dan senantiasa memberi keuntungan semua pihak, disebut prinsip Keadilan Sosial dan HAM.

**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKTOR KESEHATAN**

Terdapat lima hal yang harus diperhatikan dalam menentukan strategi pemberdayaan masyarakat sektor kesehatan, yaitu:

1. Kesadaran masyarakat

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sektor kesehatan, kesadaran masyarakat harus ditingkatkan. Peningkatan kesadaran tersebut dilakukan melalui penggerakkan masyarakat, dengan harapan masyarakat memiliki peluang terlibat aktif dalam pembangunan kesehatan yang sebesar-besarnya.

1. Organisasi masyarakat

Organisasi masyarakat lokal yang sudah ada dapat ditingkatkan perannya dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, misalnya PKK, Karang Taruna, dan sebagainya. Jika belum terbentuk mama perlu membentuk organisasi kemasyarakatan *(community organization)*.

1. Upaya advokasi

Dukungan masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan melalui pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dapat dilakukan dengan memberikan advokasi. Advokasi tersebut dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten, baik oleh aparat pemerintah, praktisi, atau kalangan akademisi.

1. Kemitraan dan partisipasi lintas sektor

Upaya pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja melainkan secara bersama-sama dengan pihak lain. Untuk itu dapat dilakukan penggalangan kemitraan dan partisipasi lintas sektor, seperti dengan sektor terkait, swasta, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

1. Kearifan lokal

Potensi dan sumberdaya berbasis kearifan lokal yang ada pada masyarakat dapat dimanfaatkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Potensi dan sumberdaya tersebut misalnya Dana Desa, kader kesehatan, dan budaya setempat yang mendukung pemberdayaan masyarakat.

**METODE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKTOR KESEHATAN**

Dalam pemberdayaan masyarakat sektor kesehatan dibutuhkan seorang fasilitator. Fasilitator ini memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan inovasi-inovasi di bidang kesehatan kepada penerima manfaat pemberdayaan yaitu masyarakat. Untuk itu dibutuhkan metode yang memudahkan fasilitasor dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian tidak ada metode pemberdayaan masyarakat sektor kesehatan yang paling baik, karena masyarakat yang menerima manfaat sangat beragam. Sehingga metode pemberdayaan masyarakat pada setiap kelompok masyarakat akan bervariasi, bahkan terdapat metode yang dilakukan bersama-sama tergantung karakteristiknya.

Menurut Permenkes No.65 tahun 2013, terdapat enam metode yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat sektor kesehatan, antara lain: